

ABSTRACT

Sulfikran. 105 251 106 819. *Analysis of Islamic Law Settlement of Abandoned Freehold Land Referring to Government Regulation NO.11 of 2010. Guided by Saidin Mansyur and Fachrudin Mansyur.*

This type of research is library research, which was conducted at the Makassar Muhammadiyah University Library. This research aims to resolve disputes over abandoned land in Law NO. 11 of 2010. This research is library research in nature, which is research carried out using literature (library) in the form of books, notes and research results reports from previous studies. The reason researchers use this type of research library research is because the problems that researchers want to study can only be obtained by means of library research.

The procedure for determining abandoned land according to Government Regulation Number 20 of 2021 is divided into 3 (three) stages: (i) Evaluation of abandoned land, (ii) Warning of abandoned land and (iii) Determination of abandoned land. Stages Commemoration/subpoena to property rights holders in government regulations that regulate a longer period, in giving opportunities to land ownership rights holders to cultivate, utilize. So that the regulation better guarantees the protection of rights and legal interests of land ownership rights. However, in Government Regulation no. 11 of 2010 does not set clear requirements regarding the criteria for owned land to become abandoned land objects, Government Regulation Number 20 of 2021 divides into 3 (three) stages: (i) Evaluation of abandoned land, (ii) Warning of abandoned land and (iii) Abandoned land designation.

Key Words: Islamic Law, Settlement of Abandoned Freehold Land

ABSTRAK

Sulfikran. 105 251 106 819. *Analisis Hukum Islam Penyelesaian Tanah Hak Milik Terlantar Merujuk Peraturan Pemerintah NO.11 Tahun 2010.* Di Bimbing oleh **Saidin Mansyur** dan **Fachrudin Mansyur.**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah terlantar dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010. Penelitian ini bersifat Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian library research adalah karena masalah yang ingin diteliti oleh peneliti hanya bisa didapatkan dengan cara studi kepustakaan.

Dalam prosedur penetapan tanah terlantar sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan : (i) Evaluasi tanah terlantar , (ii) Peringatan tanah terlantar dan (iii) Penetapan tanah terlantar. Tahapan Peringatan/somasi terhadap pemegang hak milik dalam peraturan pemerintah tersebut diatur jangka waktunya lebih lama, dalam memberikan kesempatan kepada pemegang hak milik atas tanah untuk mengusahakan, memanfaatkan. Sehingga aturan tersebut lebih menjamin perlindungan hak dan kepentingan hukum hak milik atas tanah. Namun dalam Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2010 tidak mengatur syarat jelas mengenai kriteria tanah milik dapat menjadi objek tanah terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan : (i) Evaluasi tanah terlantar , (ii) Peringatan tanah terlantar dan (iii) Penetapan tanah terlantar.

Kata kunci: Hukum islam, penyelesaian tanah hak milik terlantar